

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut PSAK (IA1, 2007) dalam “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” paragraf 07 adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

2.1.1 Peranan Laporan Keuangan

Informasi terkait kondisi dan kinerja perusahaan merupakan komoditas penting bagi para investor dalam pembuatan keputusan investasi. Dengan berdasar informasi tersebut, maka investor akan dapat menilai apakah investasi di perusahaan tersebut akan dapat menguntungkan atau tidak. Di sisi lain, perusahaan membutuhkan dana dari para investor untuk mengembangkan usahanya. Hubungan antara manajemen dan investor tersebut melahirkan dua permasalahan, yaitu *information problem* dan *agency problem*. Peranan pelaporan keuangan semakin meningkat dengan munculnya dua permasalahan tersebut (Healy dan Palepu, 2001).

A. *Information Problem*

Information problem atau yang sering disebut dengan *lemon problem* terjadi ketika terdapat perbedaan informasi antara manajemen dan investor dan menimbulkan munculnya konflik insentif antara kedua pihak tersebut.

Healy dan Palepu (2001) mencontohkan *lemon problem* dalam ilustrasi sebagai berikut:

Misal, manajemen perusahaan memiliki gagasan yang setengahnya berprospek bagus dan setengahnya buruk. Ketika investor tidak mampu membedakan antara kedua gagasan tersebut, maka manajemen akan mengungkapkan gagasan yang berprospek buruk tersebut sebagai gagasan yang sama bagusnya dengan setengah gagasan lainnya. Pada kondisi seperti ini, investor cenderung untuk menilai keseluruhan gagasan tersebut pada nilai rata-rata. Dalam hal ini terdapat perbedaan informasi antara manajemen dan investor dalam menilai gagasan tersebut. *Lemon problem* ini berakibat pada pemberian nilai yang kurang dari sebenarnya terhadap gagasan bisnis yang berprospek bagus dan pemberian nilai yang melebihi nilai sebenarnya terhadap gagasan yang berprospek buruk.

Pelaporan keuangan yang kredibel, memiliki peranan penting dalam meminimalkan *lemon problem*. Terdapat tiga langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan oleh manajemen sehingga mampu meminimalkan terjadinya *lemon problem*:

1. Mengoptimalkan kontrak antara pihak investor dengan manajemen perusahaan. Pemberian kontrak yang optimal akan menjadi insentif bagi manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi sebenarnya tentang kondisi dan kinerja perusahaan.
2. Membuat kebijakan yang mengatur tentang pengungkapan berbagai informasi yang harus dilakukan perusahaan.
3. Mengoptimalkan fungsi dari *intermediaries*, seperti analis keuangan dan lembaga pemeringkat. Keberadaan *intermediaries* tersebut diharapkan menjadi kontrol atas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

B. Agency Problem

Agency problem merupakan konsekuensi dari tidak berperan-aktifnya investor dalam pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab pengelolaan perusahaan diserahkan kepada pihak manajemen. Pada prakteknya, kepentingan pribadi manajemen sering berpengaruh dalam pembuatan

keputusan oleh manajemen, termasuk dalam penggunaan dana perusahaan. Misalnya, ketika sebagian besar investor menanamkan dananya dalam bentuk modal, maka terdapat kecenderungan manajemen untuk membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadi manajer. Kebijakan yang sering dilakukan adalah memperbesar kompensasi yang dibagikan kepada jajaran manajer atau membuat keputusan pengembangan usaha.

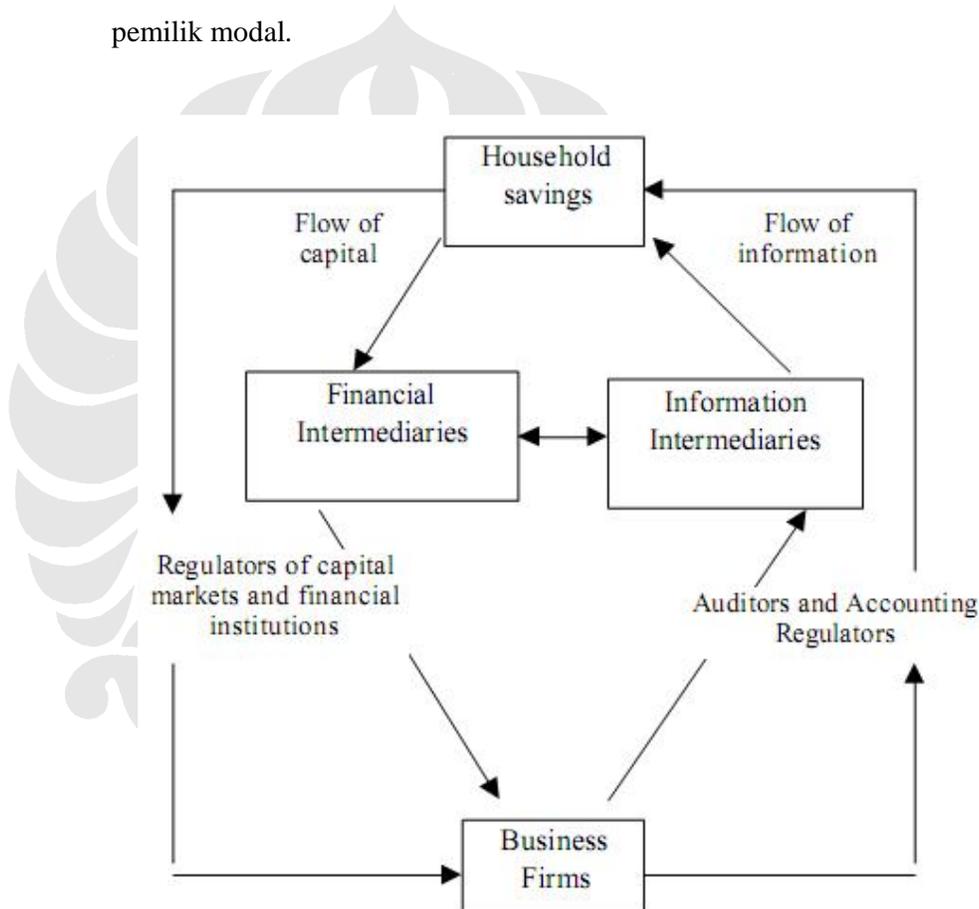
Sebaliknya, ketika para investor memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk pinjaman. Maka manajemen justru membuat kebijakan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Pembagian dividen digunakan untuk manajemen sebagai media untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kinerja perusahaan cukup baik, sehingga mampu menarik investor lain. Tetapi di sisi lain, pembagian dividen dan pelunasan pinjaman yang memiliki prioritas utama menurunkan kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman yang tidak berada pada prioritas utama terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kebijakan lain yang sering dilakukan manajemen adalah menggunakan dana perusahaan untuk diinvestasikan pada proyek yang memiliki risiko tinggi. Ketika proyek tersebut menguntungkan, manajemen akan mendapat bagian keuntungan tersebut, tetapi ketika proyek tersebut rugi, maka para pemberi pinjaman ikut menanggung kerugian tersebut.

Dalam mengatasi *agency problem*, pelaporan keuangan memiliki peranan besar. Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaporan keuangan perusahaan terkait dalam mengatasi *agency problem*:

1. Mengoptimalkan kontrak antara investor dan manajemen perusahaan. Misalnya, kontrak pemberian kompensasi kepada jajaran manajer. Pemberian kompensasi yang menarik diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan dalam mengelola perusahaan. Konsekuensi dari kontrak tersebut, pihak manajemen harus mengungkapkan berbagai informasi secara terbuka kepada para investor, sehingga investor mampu memonitor kepatuhan manajemen terhadap kontrak yang telah disepakati. Selain itu, pengungkapan berbagai informasi tersebut juga digunakan

untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen tetap memerhatikan kepentingan para pemilik modal dan tidak ditujukan untuk memenuhi kepentingan pribadi jajaran manajer.

2. Mengoptimalkan fungsi dewan komisaris. Dewan komisaris adalah pihak yang bertugas untuk mewakili kepentingan para pemilik modal. Fungsi utama dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja jajaran manajer dalam melakukan fungsi pengelolaan perusahaan. Fungsi pengawasan yang efektif akan mampu mencegah munculnya kebijakan yang merugikan pemilik modal.



Gambar 2.1 Arus Keuangan dan Informasi dalam Pasar Modal

Sumber: Healy dan Palepu, 2001

3. Mengoptimalkan keberadaan *intermediaries*. *Information intermediaries* seperti analis keuangan dan lembaga pemeringkat dapat meningkatkan kualitas dari pengungkapan informasi oleh manajemen perusahaan. Hal ini

dimungkinkan karena *information intermediaries* merupakan pihak di luar perusahaan sehingga penilaian atas kinerja dan kondisi perusahaan lebih bersifat objektif. Gambar 2.1 menggambarkan posisi *information intermediaries* dalam pasar modal.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2007).

Selain dilihat dari tujuan penyusunannya, laporan keuangan juga bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Laporan keuangan merupakan data historis yang berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepadanya.
2. Laporan keuangan bermanfaat untuk melihat kondisi keuangan serta gambaran mengenai hasil atau perkembangan usaha perusahaan.
3. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang bermanfaat sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan.
4. Laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen untuk mengetahui biaya-biaya dari berbagai kegiatan, mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses produksi dan menentukan tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh tiap-tiap kegiatan atau bagian tersebut.

5. Laporan keuangan juga bermanfaat untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang disertai wewenang dan tanggung jawab, untuk mengevaluasi serta menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2.1.3 Pihak-pihak Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat berbagai jenis informasi terkait dengan kondisi dan kinerja perusahaan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut membutuhkan informasi tersebut sebagai dasar dalam pembuatan keputusan keuangan, seperti keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan serupa lainnya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan pengungkapan informasi baik oleh perusahaan maupun oleh pihak lain, seperti analis keuangan dan auditor. Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007) memaparkan para pemakai laporan keuangan yang meliputi:

1. Investor.

Penanam modal merupakan kelompok penting pemakai informasi laporan keuangan karena mereka berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Para investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan.

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan serta kemampuan perusahaan memfasilitasi kepentingan karyawan (pemberian balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja).

3. Pemberi pinjaman.

Pihak ini tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya.
Mereka tertarik dengan informasi keuangan untuk menentukan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan.
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.
6. Pemerintah.
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat.
Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
8. Manajemen Perusahaan.
Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

2.1.4 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Imhoff (1992) dalam Ainun dan Fuad (2000) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) menyatakan bahwa kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda (*ambiguous*), banyak penelitian yang menggunakan *indeks of disclosure methodology* mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari sisi laporan keuangan. Dengan kata lain, Imhoff mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi

akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004).

Seberapa banyak informasi tersebut harus diungkapkan tidak hanya bergantung pada keahlian pembaca, akan tetapi juga pada standar yang dibutuhkan (Hendriksen, 2002 dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Terdapat tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu:

1. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor

2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh)

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah, sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik (Ainun dan Fuad, 2000 dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian yang rinci dan yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan sulit ditafsirkan (Hendriksen, 2002 dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Healy dan Palepu (2001) mengemukakan bahwa tersebarnya informasi penting yang berkaitan dengan strategi bisnis dan rencana perusahaan merugikan posisi kompetitif perusahaan sendiri.

Darrough (1993) dalam Ainun dan Fuad (2000) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*mandated disclosure*)

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi

secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary disclosure*)

Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (1993) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengemukakan meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

2.1.5 Laporan Tahunan

2.1.5.1 Komponen Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan media pelaporan keuangan oleh perusahaan. Needles *et al.* (1995) menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) komponen laporan tahunan, yaitu:

1. Sambutan kepada para pemegang saham.

Dalam bagian awal laporan tahunan, terdapat sambutan dari direktur utama perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham. Sambutan tersebut menjelaskan tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu dan prospek perusahaan ke depannya.

2. Ikhtisar data keuangan.

Ikhtisar data keuangan merupakan penyajian data keuangan penting selama 10 tahun terakhir. Penyajian data keuangan tersebut dilengkapi dengan grafik untuk mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat tren pergerakan keuangan perusahaan dalam 10 tahun terakhir. Salah satu data yang disajikan dalam bagian ini adalah tingkat penjualan bersih. Dalam bagian ini juga sering disajikan data non-keuangan, seperti jumlah toko yang dimiliki perusahaan dari periode ke periode. Hal ini berguna untuk melihat kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek perusahaan di masa mendatang.

3. Laporan keuangan.

Perusahaan menyajikan empat jenis laporan keuangan yang diwajibkan, yaitu laporan laba-rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Perusahaan menyajikan laporan keuangan secara komparatif untuk beberapa periode. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membandingkan kinerja perusahaan periode berjalan dengan periode-periode sebelumnya. Untuk perusahaan yang terdiri dari beberapa anak perusahaan harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan data yang disajikan dalam laporan keuangan, maka perusahaan harus menyajikan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Secara garis besar, catatan atas laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan transaksinya.

Bagian ini sering disajikan pada bagian awal catatan atas laporan keuangan atau pada bagian tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan. Dalam bagian ini, perusahaan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi, seperti metode penilaian persediaan, prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi, metode penyusutan aktiva tetap, kapitalisasi bunga, dan prinsip akuntansi lainnya.

b. Catatan penjelasan.

Terdapat bagian dalam catatan atas laporan keuangan yang sifatnya memberikan penjelasan terperinci atas item-item yang disajikan dalam laporan keuangan, seperti penjelasan untuk aktiva tetap perusahaan, hutang jangka panjang, transaksi sewa guna usaha yang dilakukan perusahaan, dan transaksi dalam mata uang asing.

c. Catatan yang berupa informasi pelengkap.

Dalam catatan atas laporan keuangan terdapat pengungkapan informasi yang sifatnya melengkapi informasi yang telah tersedia di laporan

keuangan. Dalam FASB, salah satu contoh informasi pelengkap yang disyaratkan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan per kuartal. Perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan interim, seperti tingkat penjualan, harga pokok penjualan, laba bersih, dan laba per saham, harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan akhir periode.

5. Laporan pertanggungjawaban manajemen.

Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian internal perusahaan. Dalam bagian ini, pada umumnya pihak manajemen menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab mereka dan bahwa laporan keuangan tersebut telah melalui proses audit.

6. Hasil diskusi dan analisis manajemen.

Terdapat bagian dalam laporan tahunan yang menyajikan hasil pembahasan dan analisis manajemen atas kondisi keuangan dan hasil kinerja yang dicapai perusahaan. Dalam bagian ini, manajemen akan melakukan analisis dengan membandingkan kinerja periode berjalan dengan beberapa periode sebelumnya. Selain itu, manajemen juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, seperti pengaruh hari raya terhadap tingkat penjualan.

7. Laporan hasil audit.

Auditor bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Auditor merupakan pihak independen yang memiliki peranan penting dalam menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Setelah pelaksanaan proses audit, auditor akan memberikan opini terhadap penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dalam sebuah laporan hasil audit. Laporan tersebut harus disajikan bersama laporan keuangan sebagai bukti bahwa laporan keuangan tersebut telah melalui proses audit.

2.1.5.2 Peraturan terkait Penyajian Laporan Tahunan

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Peraturan Nomor VIII.G.2 yang

mengatur mengenai kewajiban menyampaikan laporan tahunan bagi Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik serta mengatur bentuk dan isi laporan tahunan tersebut. Dalam pengaturan bentuk dan isi laporan tahunan tersebut, Bapepam mewajibkan laporan tahunan untuk memuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Manajemen.

Bapepam kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk tiga belas industri, yang meliputi industri manufaktur, industri investasi, industri rumah sakit, industri jalan tol, industri perhotelan, industri restoran, industri telekomunikasi, industri konstruksi, industri perdagangan, industri transportasi, industri *real estate*, industri peternakan, dan industri perkebunan.

Peraturan ini diperbarui pada tahun 2006, yaitu PERATURAN NOMOR X.K.6. dalam peraturan ini, Bapepam menambahkan item-item yang wajib diungkapkan dalam laporan tahunan, yaitu laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.

2.2 Pengungkapan Sukarela

2.2.1 Teori terkait Pengungkapan Sukarela

Menurut Henderson (2004) dalam Ningrum (2007), terdapat beberapa teori yang terkait dengan pengungkapan sukarela, yaitu:

1. *Signalling Theory*

Signaling theory membahas bagaimana sebaiknya dan seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan agen harus disampaikan (Adiningsih *et al.*). Dalam teori ini, pengungkapan informasi sukarela yang dilakukan perusahaan merupakan sinyal bagi pasar. Ketika perusahaan mengungkapkan informasi yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan lain, maka pasar akan menginterpretasikan hal tersebut sebagai "*bad news signal*" atas kondisi perusahaan tersebut. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Blaccioniare dan Patten (1994) dalam Ningrum (2007) yang

meneliti pengaruh pengungkapan aspek lingkungan perusahaan terhadap harga saham setelah tragedi Bhopal yang terjadi pada tahun 1994. Penelitian tersebut membuktikan bahwa perusahaan kimia yang melakukan pengungkapan mengenai aspek lingkungan mengalami penurunan yang relatif lebih kecil dibanding dengan perusahaan kimia lain yang tidak melakukan pengungkapan. Penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan informasi yang cukup menjadi sinyal positif bagi pasar.

2. *Political Theory*

Teori ini menyatakan bahwa dalam praktek bisnis, perusahaan dapat menanggung biaya tambahan yang muncul sebagai akibat dari adanya transfer kesejahteraan, seperti biaya pajak yang tinggi, biaya pelaporan keuangan yang tinggi, permintaan karyawan akan gaji yang tinggi, dan tingginya tingkat kerugian akibat terjadinya inefisiensi dalam operasi.

Pengungkapan sukarela dalam kaitannya mencegah atau mengurangi *political cost* dipengaruhi dua faktor. Yang pertama adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka kecenderungan perusahaan tersebut melakukan pengungkapan sukarela untuk mengurangi *political cost* yang muncul semakin besar. Faktor yang kedua adalah sifat industri perusahaan tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ness dan Mirza (1991), yang menyatakan bahwa perusahaan di industri perminyakan melakukan pengungkapan informasi yang terkait dengan aspek lingkungan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan di industri lain. Hal ini terkait dengan tekanan yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah dan masyarakat, terhadap perusahaan di industri perminyakan yang memungkinkan timbulnya *political cost* yang lebih besar.

3. *Legitimacy Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk meyakinkan bahwa nilai-nilai perusahaan sejalan dengan nilai yang berlaku di masyarakat sekitar kepada masyarakat di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Konsekuensinya adalah perusahaan memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan dari masyarakat, baik yang sifatnya implisit maupun eksplisit. Dan sebaliknya, masyarakat akan memberikan hak kepada perusahaan untuk

memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan beroperasi dalam komunitas tersebut. Dalam hal ini perusahaan harus responsif dan adaptif terhadap harapan atau keinginan masyarakat karena keinginan tersebut terus mengalami perubahan.

Dalam kenyataannya, sering terjadi peristiwa di mana perusahaan tidak bisa atau kurang optimal dalam usahanya mewujudkan keinginan masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan selanjutnya dapat mengancam keberadaannya. Ketika hal ini terjadi, salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan adalah berusaha mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan tanpa mengubah kebiasaan yang dilakukan. Alat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat adalah pengungkapan sukarela. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan dapat menginformasikan kepada masyarakat alasan kenapa perusahaan tidak dapat atau kurang optimal dalam mewujudkan keinginan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan persepsi bahwa perusahaan telah cukup responsif terhadap keinginan masyarakat atau mempengaruhi masyarakat untuk mengubah ekspektasinya terhadap perusahaan.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *legitimacy theory* antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Hogner (1982). Ia menemukan bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan sosial dengan ekspektasi masyarakat mengenai kinerja sosial perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Patten (1992) menemukan bahwa peristiwa tumpahnya minyak Exxon Valdez membuat perusahaan-perusahaan minyak meningkatkan pengungkapan mengenai lingkungan dalam laporan tahunannya.

4. Stakeholder Theory

Dalam praktek bisnis, banyak pihak yang mempengaruhi atau terpengaruh aktivitas perusahaan. Perspektif dasar dalam teori ini adalah bahwa tingkat kepentingan *stakeholder* yang beragam mempengaruhi operasi dan pelaporan yang dilakukan perusahaan. Menurut Freeman (1984), perusahaan harus mampu mengidentifikasi kepentingan *stakeholder* untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan strategik perusahaan. Berangkat dari pandangan

tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk mengelola hubungan baik dengan para *stakeholder*-nya.

Dalam teori ini terdapat dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan (*Organization-Centered Perspective*). Perspektif ini muncul karena beragamnya kepentingan *stakeholder* sehingga tidak mungkin bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh kepentingan *stakeholder*. Selain itu, perspektif ini memandang bahwa *stakeholder* memiliki tingkat kepentingan yang berbeda bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok *stakeholder* yang memiliki peranan penting bagi perusahaan dan mengelola hubungan yang baik dengan kelompok tersebut. Dalam hal ini, pengungkapan sukarela merupakan salah satu alat untuk mengelola hubungan baik tersebut.

Perspektif yang kedua adalah perspektif yang berdasar prinsip-prinsip akuntabilitas (*accountability perspective*). Dalam perspektif ini, perusahaan harus memperhatikan hak seluruh *stakeholder*, tidak hanya pada sekelompok *stakeholder* yang dianggap memiliki peranan terpenting terhadap perusahaan. Jadi, dalam perspektif ini, pengungkapan sukarela merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap seluruh *stakeholder*. Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*.

2.2.2 Motif-Motif Pengungkapan Sukarela

Keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi selain yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku juga dipengaruhi oleh beberapa motif. Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa terdapat enam motif yang mempengaruhi perusahaan dalam membuat keputusan pengungkapan sukarela:

1. *Capital Market Transaction Hypothesis*

Motif pertama yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela adalah rencana perusahaan untuk menerbitkan saham, surat hutang, atau instrumen modal lainnya. Sebelum pelaksanaan rencana tersebut, penting bagi perusahaan untuk menciptakan persepsi yang bagus tentang kondisi perusahaan di mata investor. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Healy dan Palepu (1993, 1995), bahwa persepsi investor sangat penting bagi perusahaan yang hendak menerbitkan saham, surat

hutang, ataupun rencana pendanaan lainnya. Dalam kondisi demikian, penting bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan investor. Myers dan Majluf (1986) menyebutkan bahwa tantangan utama bagi perusahaan adalah mengatasi munculnya asimetri informasi yang sering menghilangkan kepercayaan investor terhadap manajemen. Ketika hal tersebut terjadi, maka biaya atas pendanaan eksternal akan meningkat. Hal tersebut memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela. Dengan pengungkapan tersebut, diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi sehingga pada akhirnya mampu menurunkan biaya atas pendanaan eksternal.

2. *Corporate Control Contest Hypothesis*

Motif kedua dari pengungkapan sukarela oleh perusahaan adalah adanya persaingan untuk mengelola perusahaan. Dewan komisaris dan para pemilik modal menyerahkan tanggung jawab kinerja saham perusahaan kepada manajemen. Warner dan Weinsbach (1988) menyebutkan bahwa pergantian CEO berhubungan dengan kinerja saham perusahaan. Harga saham yang rendah menjadi pemicu terjadinya pengambilalihan pengelolaan perusahaan oleh pihak lain. Ketika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan pergantian CEO cukup besar.

Risiko hilangnya pekerjaan sebagai akibat buruknya kinerja saham perusahaan memotivasi manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela. Pengungkapan tersebut diharapkan mampu menjadi media untuk menjelaskan alasan mengapa harga saham memburuk dan mengurangi penilaian yang buruk terhadap kinerja manajemen.

3. *Stock Compensation Hypothesis*

Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang menawarkan bentuk kompensasi lain kepada jajaran manajer dan karyawan. Salah satunya adalah pemberian hak untuk memberi saham perusahaan pada tingkat harga tertentu. Kompensasi saham tersebut membuat manajer memiliki peran ganda, yaitu sebagai pihak yang menjalankan fungsi eksekutif perusahaan sekaligus sebagai pemilik saham perusahaan, meskipun dalam jumlah yang kecil. Hal tersebut yang mempengaruhi manajer dalam membuat keputusan terkait dengan tingkat pengungkapan informasi perusahaan.

Manajer yang mendapat kompensasi saham memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan sukarela. Terdapat dua alasan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:

- a. Sudut pandang manajer sebagai pihak yang berniat melakukan jual beli saham yang diperolehnya. Adanya larangan *insider trading* yang semakin diperketat, memotivasi manajer untuk melakukan pengungkapan sukarela. Dengan pengungkapan tersebut, diharapkan dapat mengoreksi nilai saham yang *undervalued* dan meningkatkan likuiditas saham perusahaan sehingga manajer dapat memperoleh keuntungan dari jual beli saham perusahaan pada nilai yang sebenarnya. Meskipun demikian, praktek *insider trading* masih terjadi. Praktek ini sebenarnya menguntungkan manajer karena manajer dapat membeli saham pada tingkat harga yang lebih rendah. Pada kondisi yang seperti ini, manajer akan memilih untuk tidak melakukan pengungkapan sukarela.
- b. Sudut pandang manajer sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam hal ini manajer akan meningkatkan pengungkapan sukarela dengan maksud untuk menurunkan biaya kontrak terkait dengan kompensasi saham yang diberikan kepada karyawan baru. Kompensasi saham merupakan salah satu alternatif kompensasi yang menarik bagi manajer dan karyawan ketika harga saham yang ditentukan benar-benar mencerminkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan sukarela tersebut dapat mencegah penilaian yang salah terhadap saham perusahaan, sehingga pada akhirnya biaya kontrak atas pemberian kompensasi saham tersebut dapat ditekan.

4. *Litigation Cost Hypothesis*

Aspek hukum turut berpengaruh dalam keputusan pengungkapan oleh manajer. Pengaruh pertama adalah ketika hukum atau peraturan yang berlaku menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan pada tingkat dan waktu yang tepat. Ketika hal tersebut terjadi, maka terdapat kecenderungan bagi manajer untuk meningkatkan pengungkapan sukarela, terlebih ketika terdapat informasi negatif tentang perusahaan. Manajer meningkatkan pengungkapannya dengan maksud untuk menurunkan risiko terkena tuntutan hukum, karena

ketika informasi negatif tersebut ditunda untuk diungkapkan akan berpotensi memunculkan kerugian terhadap beberapa pihak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perusahaan terganjal masalah hukum.

Pengaruh kedua bersifat kebalikan dari pengaruh pertama. Aspek hukum justru menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan pengungkapan sukarela. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan yakin bahwa perusahaan tidak melakukan kesalahan yang disengaja, ternasuk dalam pengungkapan informasi kepada *stakeholder* dan perusahaan yakin bahwa sistem hukum dapat membedakan kesalahan manajemen yang benar-benar disengaja dengan yang tidak disengaja.

5. *Management Talent Signaling Hypothesis*

Truman (1986) menyatakan bahwa manajer dengan kemampuan yang baik memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan *forecast* pendapatan perusahaan dengan sukarela. Alasan utama yang melatarbelakangi pernyataan tersebut adalah bahwa nilai perusahaan sangat tergantung kepada persepsi investor mengenai kemampuan manajer mengelola perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Ketika manajer melakukan pengungkapan sukarela terutama *forecast* pendapatan di masa datang, maka investor akan menginterpretasikan bahwa manajer memiliki strategi dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan.

6. *Proprietary Cost Hypothesis*

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat persaingan antar perusahaan adalah Verrechia (1983), Darrough dan Stoughton (1990), Wagenhofer (1990), Feltman dan Xie (1992), Newman dan Sansing (1993), Darrough (1993), dan Gigler (1994). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki insentif untuk tidak mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dianggap akan membahayakan posisi persaingannya. Teori ini dikaji lebih jauh oleh Verrechia (2001) dan Dye (2001). Tidak seperti kelima motif pengungkapan sukarela lainnya, *proprietary cost hypothesis* mengasumsikan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan

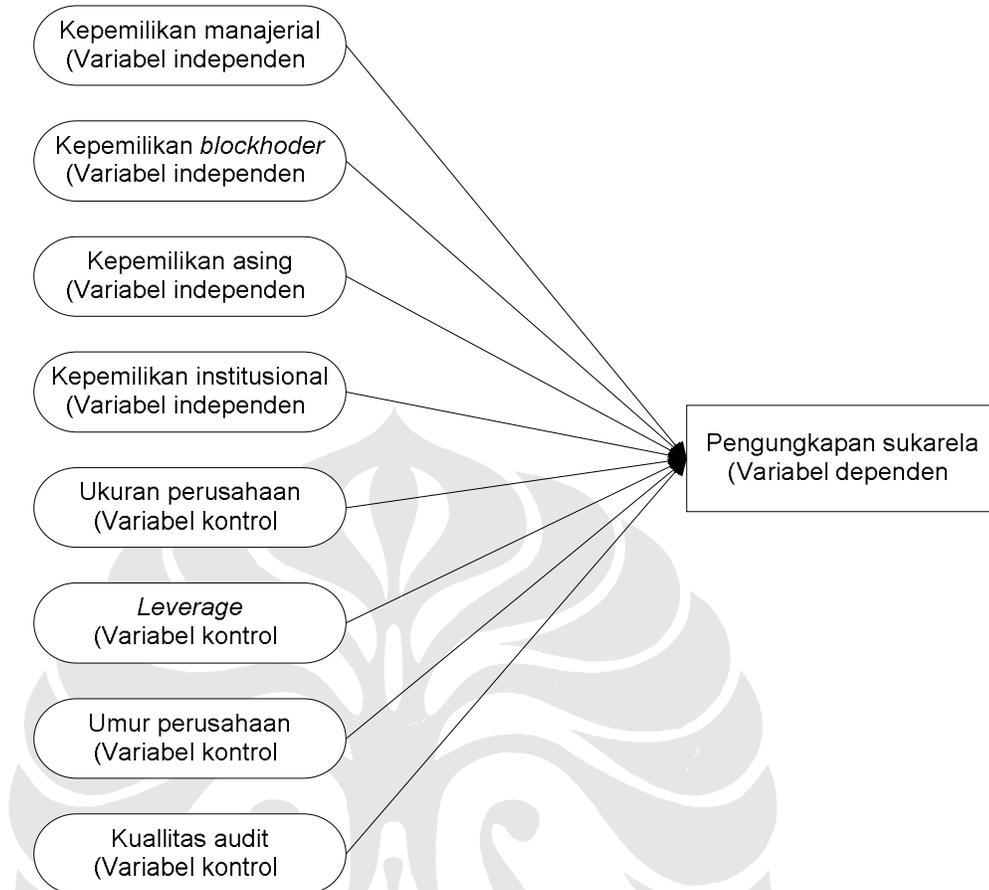
pemegang saham. Sebagai hasilnya, hipotesis ini memprediksikan bahwa pengungkapan sukarela akan selalu kredibel. Hal ini karena fokus dari hipotesis ini adalah *economic forces* yang membatasi pengungkapan penuh.

Penelitian Hayes dan Lundhlo (1996) membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tingkat kinerjanya relatif sama dengan dalam bidang industri yang sama cenderung akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dibanding dengan perusahaan yang bergerak dalam industri lintas bisnis (melakukan diversifikasi).

2.3 Kerangka Penelitian

Tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan motif. Penelitian empiris pada determinan-determinan yang mempengaruhi pengungkapan sukarela bercabang pada dua aliran utama, yaitu mendokumentasikan pengaruh dari karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan, pencatatan di bursa (*listing*), *leverage*, *profit* dan pertumbuhan (*growth*); dan melihat pengaruh *corporate governance*, termasuk struktur kepemilikan dan komposisi dewan (dewan komisaris dan dewan direksi) terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. beberapa jenis kepemilikan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Gambar 2.2 memaparkan kerangka berpikir penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kepemilikan Manajerial

Luo *et al.* (2006) dalam Darus *et al.* (2008) mengemukakan bahwa ketika kepemilikan manajerial meningkat, maka terdapat peningkatan *risk averse* untuk kesejahteraan *boards* itu sendiri dan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak konsisten dengan kepentingan pemegang saham eksternal. Sejalan dengan hal ini, *boards* tersebut akan cenderung melakukan pengungkapan yang kurang atau seadanya untuk menghindari pengawasan pemegang saham eksternal. Warfield *et al.* (1995) Darus *et al.* (2008) melihat hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan dalam perspektif substitusi. Dari perspektif ini, manajemen memiliki insentif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang

memaksimalkan nilai perusahaan ketika terdapat kepemilikan manajerial yang cukup tinggi dalam perusahaan. Kegiatan-kegiatan ini membuat kepentingan manajemen dan pemegang saham eksternal semakin sejalan, dan membuat permintaan pemegang saham eksternal terhadap pengungkapan perusahaan yang lebih detail dalam rangka memonitor kegiatan manajemen menjadi berkurang.

H1: Terdapat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan tingkat pengungkapan sukarela.

2.4.2 Kepemilikan *Blockholder*

Kepemilikan *blockholder* merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan jumlah yang substansial, yaitu sebesar 5 (lima) persen atau lebih dari jumlah saham beredar (Bapepam, 2006). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa pemegang saham substansial diharapkan memiliki kekuasaan dan insentif yang lebih besar dalam memonitor manajemen, karena kesejahteraan mereka terkait erat dengan kinerja keuangan perusahaan.

H2: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan *blockholder* dan tingkat pengungkapan sukarela.

2.4.3 Kepemilikan Asing

Secara umum, pemegang saham asing lebih rentan terhadap asimetri informasi karena terdapat kendala jarak dan bahasa. Myers dan Majluf (1986) dalam Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa jika permasalahan asimetri informasi tidak dapat diatasi, maka biaya modal perusahaan akan meningkat. Sebagai konsekuensinya, manajer yang memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan sukarela untuk mengurangi masalah asimetri informasi, sehingga diharapkan akan mengurangi biaya modal perusahaan. Xiao dan Yuan (2007) meneliti pengaruh struktur kepemilikan, dan komposisi *boards* terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Cina. Keberadaan kepemilikan asing memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan pengungkapan sukarela perusahaan.

H3: Perusahaan dengan kepemilikan asing akan memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan tanpa kepemilikan asing.

2.4.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, dan perusahaan investasi terhadap jumlah saham beredar. Agrawal (1990) dalam Agrawal dan Knoeber (1996) dalam Guan, Sheu, dan Chu (2007) mengemukakan bahwa investor institusional lebih berpengalaman dan memiliki keahlian teknis untuk memonitor manajer secara efektif. Semakin tinggi jumlah investor institusional, maka akan terdapat peningkatan insentif bagi perusahaan untuk berperan aktif dalam *corporate governance*, termasuk dalam hal pengungkapan. Chan, Lin, dalam Zhang (2007) dalam Pizzaro *et al.* (2008) menemukan bahwa terdapat pengungkapan akuntansi yang kredibel ketika kepemilikan pemerintah berkurang dan kepemilikan institusional meningkat, karena terdapat permintaan akan audit yang berkualitas tinggi.

H4: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dan tingkat pengungkapan sukarela.